

MEMAKNAI KEMBALI MULTIKULTURALISME INDONESIA DALAM BINGKAI PANCASILA

Abd Mu'id Aris Shofa

Center for Culture and Frontier Studies (CCFS) Universitas Brawijaya
arisshofa23@gmail.com

ABSTRAK

Multikulturalisme dapat dipahami sebagai pengakuan tentang keanekaragaman dari masyarakat yang majemuk, heterogen dan plural. Apabila hal itu diperluas bisa juga dimaknai sebagai suatu keanekaragaman budaya, tradisi, gaya hidup, agama dan bentuk-bentuk perbedaan yang lainnya. Bagi bangsa Indonesia yang memang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kemajemukan dan pluralitas tersebut, sudah seharusnya menjadi satu kebanggaan dan kekuatan yang besar bagi bangsa Indonesia. Multikulturalisme tidak saja diakui tetapi juga bisa diterima akan adanya perbedaan, suku, agama, ras, antar golongan dan etnis. Masyarakat Indonesia yang hidup didalamnya harus mampu hidup berdampingan antara satu dengan yang lainnya, sehingga harmonisasi yang selama ini didambakan oleh bangsa Indonesia bisa terwujud dengan baik.

Sejarah bangsa kita telah menunjukan bahwa bangsa Indonesia telah dipersatukan dengan adanya kesepakatan bersama para pendiri bangsa kita yang dari berbagai perbedaan dengan Pancasila (tidak ada yang lain). Sebagai pemersatu ideologi bangsa adanya Pancasila adalah sebuah solusi dari adanya konflik yang terjadi antar golongan nasionalis dan agama, Pancasila telah mampu menunjukkan fungsinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk, heterogen, multikultural.

Kata Kunci: multikulturalisme, Indonesia, pancasila

PENDAHULUAN

Multikulturalitas bangsa merupakan realitas dalam komunitas Indonesia yang tak mungkin dipungkiri dan dihindari, bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan bahasa, suku, bangsa dan agama. Kondisi ini merupakan berkah dan hikmah apabila kita mampu mengaransemennya dalam sebuah keterpaduan yang menghasilkan keindahan dan kekuatan, tetapi juga bisa menjadi musibah disintegrasikan bangsa manakala multikulturalitas itu tidak terakomodasi dengan baik. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika desain dari pendirian bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia adalah negara yang bersatu, berdaulat adil dan makmur, untuk mewujudkan sebuah negara kebangsaan “ yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan”. Sebab para pendiri bangsa Indonesia ini meyakini bahwa hanya melalui sebuah negara kebangsaan, demokrasi, keadilan sosial, dan perikemanusiaan (HAM) yang kemudian dipadu dengan kesadaran berketuhanan Yang Maha Esa, kemajemukan pluralitas bangsa ini

bermakna positif. Seperti cuplikan pidato Bung Karno pada tanggal 1 juni 1945, “ Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara “ semua buat semua, satu buat semua, semua buat semua.

Kondisi realitas masyarakat Indonesia sekarang ini masih ada anggapan dari sebagian kelompok masyarakat bahwa perbedaan itu adalah musuh yang harus dikalahkan, perbedaan itu adalah suatu ancaman yang harus dihilangkan. Kelihatannya terlalu berlebihan, keberagaman suku, agama, budaya, ras dan antar golongan bukanlah suatu ancaman dan potensi konflik yang berakibat terjadinya disintegrasi bangsa. Tetapi justru perbedaan itu adalah jalan menuju pengintegrasian bagi bangsa Indonesia. Artinya, kondisi masyarakat yang sangat multikultural itu bisa mendorong masyarakat untuk secara otomatis melakukan pengintegrasian secara menyeluruh. Sejarah sudah membuktikan bahwa bangsa Indonesia dibentuk berdasarkan atas perbedaan-

perbedaan yang membenteng dari sabang sampai merauke, dan tidak ada sedikitpun kekhawatiran akan terjadinya suatu disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa terjadi ketika diantara masyarakat tidak dapat dan tidak mampu mengaransemen perbedaan kemajemukan dan multikultural itu dengan baik. Selain itu anggapan adanya kelompok mayoritas dan minoritas, superior dan inferior harus dihilangkan.

Untuk itu diperlukan suatu pemahaman dan kemauan mengapresiasi keberagaman multikultural dalam masyarakat dan kebudayaan Indonesia bahwa pihak mayoritas atau superior dalam mempertahankan eksistensinya, baik langsung maupun tidak memerlukan sumbangan pihak minoritas dan inferior. Dikotomi mayoritas-minoritas, superior-inferior pada aspek multikulturalisme bisa menjadi tragedi besar, bila ditumpangi dengan muatan politik-ideologis ataupun ketimpangan dalam kesempatan kinerja ekonomi (Kusumohamidjojo, 2000). Dengan demikian, pembangunan masyarakat Indonesia yang bhinneka memerlukan kesadaran penuh tentang ketunggalan dalam keberagaman. Ini merupakan ide tentang penegakan kesatuan Indonesia berdasarkan upaya mengapresiasi keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Keaneragaman masyarakat dan kebudayaan Indonesia sesungguhnya bukan masalah baru. Menurut Franz Magnis-Suseno (2010) bahwa sejak sebelum berdirinya sebagai negara merdeka, Indonesia sudah menghadapi persoalan besar yang berkaitan dengan keanekaragaman kebudayaan dan agama, yaitu pertentangan dalam penetapan sila pertama dalam Pancasila antara kelompok nasionalis dan kelompok agama. Persoalan ini menjadi semakin besar seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika sejarah yang menyertainya.

Masalah kebhinnekaan itu perlu dibedah secara tuntas, agar masyarakat Indonesia tidak terbuai dan hanyut dalam slogan, seolah-olah

keanekaragaman itu lebih merupakan berkah dan bukan pekerjaan rumah. Hal ini dipahami oleh banyak orang Indonesia yang berpikir jernih dan menyadari beratnya tantangan masa depan negara-bangsa ini. Dalam kerangka inilah letak relevansi multikulturalisme untuk membahas masalah kebhinnekaan masyarakat Indonesia. Tegasnya, bangsa Indonesia yang multikultural mutlak harus dipandang dari kacamata multikulturalisme, sebagaimana dikemukakan Franz Magnis-Suseno (2005) bahwa Indonesia hanya dapat bersatu, bila keanekaragaman yang menjadi kenyataan sosial dihormati. Artinya, penegakan kesatuan Indonesia bukan hendak menghilangkan identitas setiap komponen bangsa, tetapi harapannya agar semuanya menjadi warga negara Indonesia tanpa merasa terasing. Sikap saling menghormati identitas masing-masing dan kesediaan untuk tidak memaksakan pandangan sendiri tentang yang baik kepada siapapun merupakan syarat keberhasilan masa depan Indonesia. Untuk itu, diperlukan transformasi kesadaran multikulturalisme menjadi identitas nasional, integrasi nasional, dan menempatkan agama menjadi fondasi kesatuan bangsa.

PEMBAHASAN

1. Degradasi Semangat Persatuan dan Kesatuan

Sesuai dengan tujuan dari semangat proklamasi kemerdekaan bahwa bangsa Indonesia merdeka ingin membentuk suatu negara yang berdiri diatas satu pondasi semangat persatuan dan kesatuan, sehingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu ditegaskan di dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Artinya berangkat dari realitas sejarah bangsa Indonesia yang sangat multikultural itulah maka bangsa Indonesia mempunyai cita-cita bersama untuk hidup bersama didalam satu

bangunan rumah yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun melihat kondisi kekinian sering kita jumpai banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan masalah multikulturalisme dalam bingkai kebhinekaan.

Melihat hal diatas dapat diartikan bahwa membangun kesadaran multikulturalisme dalam sebuah negara-bangsa, seperti Indonesia bukanlah upaya yang mudah. Bhinneka Tunggal Ika sebagai teks ideal yang diharapkan dapat menyelesaikan persoalan multikultural di Indonesia, ternyata mengalami penafsiran yang berbeda-beda dalam setiap orde pemerintahan pasca kemerdekaan. Keberhasilan membangun semangat kebangsaan melalui wacana perlawanan terhadap kolonial, ternyata tidak dibarengi dengan keberhasilan yang sama dalam konsolidasi politik nasional. Pada masa pemerintahan orde lama, pemimpin menggairahkan semboyan bhineka tunggal ika menjadi wacana yang populis untuk melawan kapitalisme dan imperialisme, hanya melalui semangat persatuan dan kesatuan itulah perjuangan bisa dimenangkan.

Upaya yang dilakukan oleh orde lama dalam menggalang semangat persatuan dan kesatuan adalah dengan konsepsi NASAKOM (nasionalis, agama dan komunis), maksud baik yang dilakukan sebagai upaya untuk menyatukan perbedaan ternyata justru melahirkan segmentasi baru dimasyarakat yaitu kedalam dunia politik yang berbasis ideologi. Seperti, PNI (nasionalis), Masyumi dan PSI (religius atau islam), PKI (komunis). Keberhasilan membangun semangat kebangsaan melalui wacana perlawanan terhadap kolonial, ternyata tidak dibarengi dengan keberhasilan yang sama dalam konsolidasi politik nasional. Sistem politik multipartai yang diterapkan pemerintah Orde Lama telah membawa masyarakat Indonesia pada gejolak politik yang melelahkan dan mencapai puncak ketegangan pada

lahirnya tragedi berdarah 30 September 1965 (Nurkhoiron, 2007).

Berbeda dengan masa orde lama, di rezim pemerintahan orde baru lebih meningkatkan penguasaan dan dominasi massa melalui demobilisasi dan deideologisasi. Kebijakan kebudayaan Orde Baru diarahkan untuk memantapkan stabilitas nasional dengan menggiring kebudayaan-kebudayaan daerah menjadi tonggak-tonggak kebudayaan nasional. Hasilnya berupa proses pembakuan sehingga melahirkan efek pada tumbangnya perbedaan budaya dan hancurnya kebudayaan-kebudayaan lokal. Agama dan etnisitas tidak dikelola berdasarkan skema multikultur sehingga sering menjadi sumber perpecahan dan konflik. Pada masa ini pemerintah telah mengambil peran dominan dalam kebijakan multikulturalisme melalui penafsiran tunggal terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Situasi keamanan negara dan masyarakat memang cenderung stabil di permukaan karena pemerintah mengambil sikap represif terhadap munculnya berbagai isu, ideologi, dan ekspresi budaya yang berbeda dianggap menjadi ancaman dan gangguan terhadap stabilitas nasional. Kebijakan ini didukung oleh kerja militeristik yang kuat melalui Dwifungsi ABRI sehingga militer bukan saja hanya mengambil peran sebagai alat keamanan, tetapi juga alat politik pemerintah.

Tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya presiden Soeharto telah membawa babak baru dalam multikulturalisme Indonesia. Kebebasan berekspresi dan berpendapat diapresiasi dan diberikan ruang seluas-luasnya oleh kelompok-kelompok yang selama masa pemerintahan Orde Baru tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Dengan memainkan isu identitas, kelompok-kelompok ini mulai membangun eksistensinya. Di beberapa tempat sejumlah kelompok Islam membangun laskar-laskar paramiliter untuk "membela Tuhannya". Demikian juga dengan dipaksakannya penegakkan

syariat Islam sebagai bagian dari kebijakan publik di daerah. Hal serupa juga terjadi di Propinsi Papua yang memaksakan diberlakukakannya Perda berbasis Injil (Nurkhoiron, 2007). Wacana kedaerahan seperti itu juga muncul di Bali lewat gema wacana Ajeg Bali yang dikumandangkan oleh berbagai lapisan sosial masyarakat Bali.

Walaupun wacana ini menunjukkan gejala serupa, tetapi tidak sepenuhnya demikian, seperti ditegaskan oleh Atmadja (2005) bahwa wacana Ajeg Bali merupakan gerakan mempertahankan identitas kultural sebagai respons orang Bali terhadap modernisasi dan globalisasi. Boleh jadi, juga prasangka etnis memicu lahirnya wacana Ajeg Bali tersebut sebagai akibat terdesaknya penduduk asli dari dominasi pendatang. Maraknya artikulasi politik identitas yang membangkitkan berbagai aspirasi etnis, agama, dan isu lokalitas memang menjadi sinyal baru bagi dinamika politik mutakhir pascaotoritarianisme Orde Baru. Kebijakan otonomi daerah yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah multikulturalisme di Indonesia, ternyata berubah menjadi hiperotonomi sehingga memunculkan politik kedaerahan yang semakin menajamkan prasangka-prasangka etnis, agama, kebudayaan dan lokalitas. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan mencolok antara multikulturalisme sebagai gejala epistemologis dan multikulturalisme sebagai gejala politik. Ketika perbedaan-perbedaan multikultural ini tidak bida direspon dengan positif maka sulit untuk berharap adanya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Indonesia. Parekh (2008) salah seorang proponent teori multikulturalisme merekomendasikan bahwa multikulturalisme bukanlah sebuah doktrin politik dengan muatan programatik, tidak pula sebagai sebuah aliran filsafat dengan teori yang khas tentang tempat manusia di dunia, melainkan lebih sebagai sebuah perspektif atau cara melihat kehidupan manusia.

2. Bhineka Tunggal Ika Perekat nasionalisme Indonesia

Akar nasionalisme Indonesia sejak awal justru didasarkan pada tekad yang menekankan pada pentingnya cita-cita bersama, di samping pengakuan sekaligus penghargaan pada perbedaan sebagai pengikat kebangsaan. Kesadaran semacam itu jelas terlihat pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pada pentingnya cita-cita yang sama dan sekaligus kemajemukan sebagai perekat kebangsaan. Pada prinsipnya etika ini meneguhkan pada pentingnya komitmen negara untuk memberi ruang bagi kemajemukan pada satu pihak dan pada pihak lain tercapainya cita-cita kemakmuran dan keadilan sebagai wujud dari tujuan nasionalisme Indonesia (Sparringa, 2006).

Sejarah bangsa kita sangat jelas memberikan pelajaran bahwa bangsa Indonesia menjadi kenyataan karena dua kali ada komponen bangsa yang merelakan kedudukannya demi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam sumpah pemuda 1928 para pemuda *jong djawa* merelakan bahasa melayu menjadi bahasa Indonesia. Seandainya saja bahasa Jawa yang dijadikan bahasa Indonesia, maka republik Indonesia akan dipahami sebagai republic Jawa Raya dengan akibat bahwa kaum Sunda, Minang, Batak, Bugis, Ambon, Bali, Aceh dan daerah lain sangat mungkin tidak akan ikut terintegrasi.

Peristiwa yang kedua adalah dimana dalam sidang penetapan sila Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesepakatan itu memastikan bahwa Indonesia menjadi milik seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya perbedaan berdasarkan atas agama mayoritas atau minoritas, agama yang superior atau inferior. Kesediaan para wakil umat Islam dalam kepatitiaan untuk tidak menuntut kedudukan khusus dalam Undang-Undang Dasar meski mereka secara realitas adalah agama yang terbesar di Indonesia

memungkinkan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Bisa dibayangkan dalam catatan sejarah seandainya saja sila pertama dalam Pancasila itu masih mencantumkan nilai dari satu agama tertentu, maka bisa dipastikan masyarakat Indonesia dibagian timur tidak akan masuk dalam wilayah kesatuan republik Indonesia.

Indonesia dikenal oleh dunia sebagai satu negara kepulauan yang memiliki pluralitas, kemajemukan, dan heterogenitas suku bangsa yang mendiami kepulauannya. Didalam penelitian etnologi diketahui bahwa Indonesia memiliki kurang lebih 600 suku bangsa dengan perbedaan identitasnya masing-masing dan dengan kebudayaan yang berbeda. Dari catatan sensus tahun 2000, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 101 suku bangsa dengan jumlah penduduk 201.092.238 jiwa sebagai warga negara. Dari sisi agama, kepulauan di Indonesia yang dalam sejarahnya memanglah jalur perdagangan internasional membawa dampak langsung bagi penyebaran agama-agama besar di dunia. Sejak zaman pra kemerdekaan sampai sekarang setidaknya ada 6 agama yang diakui oleh negara sebagai agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khonghucu. Tentunya masih banyak lagi agama-agama lokal dan aliran kepercayaan yang diyakini dalam masyarakat Indonesia.

Secara substansi, sesanti Bhineka Tunggal Ika adalah sesanti yang mengingatkan kita semua untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sesanti ini lengkapnya berbunyi *Bhineka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrva*. Yang artinya berbeda-beda atau beragam, namun tetap satu, karena tidak ada kebenaran yang mendua. Didalam kakawin sutasoma mpu tantular secara lengkap menyinggung bhineka tunggal ika yang pada awalnya karena adanya perbedaan antara agama budha dan hindu (siwa). Hal tersebut

dimaksudkan untuk menghindari konflik. Kemudian dalam sejarah bangsa Indonesia dipilhnya kata-kata Bhineka Tunggal Ika dalam pita lambing burung garuda semata-mata dimaksudkan karena kata tersebut sangat bermakna dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dengan multi etnisnya, agamanya, rasnya, antar golongannya adalah suatu keberagaman yang sejatiya berada dalam satu bangsa dan Negara Indonesia berdasarkan pancasila sebagai falsafah bangsa.

3. Pancasila: Falsafah Bangsa dan Pemersatu Bangsa Samapai Akhir Masa

Indonesia adalah negara yang multikultural yang berdasarkan atas multi etnik, multi bahasa, multi agama dan multi budaya. Jika kenyataan ini tidak bisa diolah dan di aransemen dengan baik, maka akan bisa menimbulkan kekacauan yang bisa membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini sudah sering terlihat dalam konteks kehidupan masyarakat kita dengan banyaknya konflik-konflik yang terjadi baik di poso, ambon, papua, aceh dan daerah-daerah lainnya. Akan tetapi jika bangsa Indonesia mampu mengelola perbedaan-perbedaan itu dengan baik maka itu menjadi satu kekuatan besar yang tidak tertandingi. Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan melalui semangat persatuan dan kesatuan yang kuat.

Ideologi memberi bangsa Indonesia hal-hal yang ideal untuk diyakini akan kebenarannya, fungsi penting dari ideologi adalah membentuk identitas kelompok yang majemuk dan multikultural. Ideologi memiliki kecenderungan untuk memisahkan kita (*ingrouop*) dari mereka (*outgroup*). Dengan demikian maka ideologi berfungsi mempersatukan. Apabila dibandingkan dengan agama, agama juga berfungsi mempersatukan manusia dari berbagai kalangan yang majemuk dengan berbagai pandangan hidup

masing-masing, bahkan mempersatukan manusia dari berbagai negara yang diikat dengan ideologinya masing-masing. sebaliknya ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama dan untuk mengatasi konflik atau ketegangan sosial.

Belajar dari semangat para pemuda pada 1928 yang telah mampu mempelopori persatuan dan kesatuan bangsa, maka kita sebagai generasi penerus bangsa meskipun dalam berbagai kesulitan dan keprihatinan masih mewarnai berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Seharusnya kita mampu mempertahankan dan terus memperjuangkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa yang telah diwariskan para pendahulu kita dengan tetap berpegang teguh pada semboyan Bhineka Tunggal Ika dan ideologi Pancasila.

Pancasila adalah *common platform* sekaligus rasionalitas publik di mana keberagaman dari budaya, agama, etnis dan ras bertemu dan disana terbentuk suatu negara bangsa. Di dalam negara bangsa kita identitas kedaerahan, identitas keagamaan semua merasa terwakili. Tidak berlaku yang namanya mayoritas minoritas atau superior inferior karena semua tertampung dengan sama. Demokrasi yang berlaku bukanlah demokrasi mayoritarian tetapi adalah demokrasi Pancasila (Oentoro, 2010). Adat istiadat yang beragam pun juga dihormati dan di abadikan dalam semangat Bhineka Tunggal Ika.

Pancasila adalah suatu sistem nilai yang digali dari nilai dan identitas bangsa yang berdasarkan atas kehidupan sosial, kultural, dan religiusitas yang beragam dan majemuk. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan. Kerukunan umat beragama, keberagaman etnistas, budaya dan bahasa akan terjaga apabila kita dapat menjaga konsistensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Fakta kemajemukan dan multikulturalitas dalam masyarakat harus dihormati, dilestarikan, dan dikembangkan

berdasarkan atas nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila.

KESIMPULAN

Pada akhirnya dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan kesatuan Indonesia dapat ditempuh setidaknya tiga upaya berikut. Pertama, mentransformasikan kesadaran multikulturalisme menjadi identitas nasional dengan bertumpu pada penghargaan terhadap kemajemukan, heterogenitas dan pluralitas masyarakat Indonesia. Untuk itu Bhineka Tunggal Ika sebagai teks ideal senantiasa perlu dibaca ulang pada setiap zaman karena pada prinsipnya identitas tidak pernah final. Kedua, membangun integrasi nasional yang berbasis multikulturalisme dengan mendorong kesadaran masyarakat menggunakan hak konstitusinya dalam berkumpul, berserikat, dan berpendapat guna memperjuangkan hak-hak keadilan, kebebasan, kesetaraan, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Multikulturalisme bukan saja hanya menuntut kehidupan bersama berdasarkan atas bhineka tunggal ika yang penuh toleransi, dan rukun-rukun saja tetapi juga pengertian dan penghargaan antar budaya, antar agama, antar etnik dalam membina suatu tatanan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, ketentraman dan cinta kasih. Masih banyaknya masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini bukanlah suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Apabila setiap orang mempunyai kemauan yang kuat (*political will*) untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman di bumi pertiwi ini maka semua permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan dengan satu jalan yaitu melalui Pancasila. Dengan demikian, Pancasila menjadi pemersatu bagi seluruh masyarakat dan tidak sebaliknya menjadi alat pemecah belah persatuan Indonesia dan Pancasila akan kekal abadi sepanjang zaman selama negara bangsa Indonesia masih ada di dunia. Bung karno dalam pidato 1 juni 1945

berkata: Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tapi kita mendirikan negara “ semua buat semua”, “ satu buat semua, semua buat satu”.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, Hikmat (ed), 2005, *Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Interseksi/The Interseksi Foundation.
- Hutington, Samuel P., 2003, *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*, Yogyakarta: Qalam.
- Hefner, Robert W., 2007, *Politik Multukulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2000, *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Nurkhoiron, M., 2007, “Minoritisasi dan Agenda Multikulturalisme di Indonesia: Sebuah Catatan Awal”, dalam *Hak Minoritas Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*, diedit oleh Marsudi Noorsalim, Jakarta: Yayasan Interseksi/The Interseksi Foundation.
- Oentoro, Jimmy., 2010, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Membangun Bhineka Tunggal Ika di Bumi Nusantara*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Parekh, Bhiku., 2007, *Rethinking Multikulturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sparringa, Daniel. 2006. “Multikulturalisme Indonesia: Nilai-nilai Baru untuk Indonesia Baru (sebuah Jawaban terhadap Kemajemukan)”. Makalah disampaikan dalam seminar tentang “Pendidikan Nilai-nilai Kehidupan Ditinjau dari Berbagai Perspektif Ilmu” yang diselenggarakan oleh Universitas Atmajaya, Jakarta, 18 November 2006.
- Susetiawan., 2008, Pluralitas dan Integrasi Sosial Dalam Masyarakat Multicultural, dalam *Spiritualitas Multikultur Sebagai Landasan Gerakan Sosial Baru*, Yogyakarta: kanisius.
- Suseno, Franz Magnis., 2005, *Berebut Jiwa Bangsa*, Jakarta: Kompas.
- Tilaar, H.A.R., 2004, *Multikulturalisme Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta

